



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pemaparan

VISI DAN MISI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 – 2022

Yogyakarta, 2 Agustus 2017

***Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
salam sejahtera untuk kita semua***

Sidang Paripurna DPRD DIY yang saya hormati,

Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa atas ridhlo-Nya, sehingga pada hari ini Rabu Wage tanggal 2 Agustus 2017 kita semua diberi kesehatan, kekuatan dan kemampuan untuk dapat hadir pada Majelis Yang Sangat Mulia ini, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam rangka mengawali dan memberikan gambaran arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022, ijinkanlah dalam kesempatan ini saya menyampaikan pemikiran-pemikiran ke depan yang merupakan sambungan atau rangkaian dari pemikiran jangka

panjang dan lima tahun sebelumnya yang pernah tertuang dalam Visi dan Misi Gubernur Tahun 2012-2017 yang pada waktu itu meletakkan konsep "*Renaissance* Yogyakarta" sebagai landasan pijak arah pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kurun waktu lima tahun yang lalu.

Renaissance adalah kelahiran kembali masa keemasan budaya klasik. *Renaissance* adalah revolusi budaya antitesa terhadap kakunya pemikiran dan tradisi abad silam. Faham rasionalisme, dipilih untuk melahirkan gerakan *Jogja Gumregah* untuk melepaskan diri dari kungkungan mitologi dan kejumudan dogmatis, melalui proses *Gumregah*-nya kebudayaan ke tingkat kebudayaan yang unggul.

Peradaban unggul, pada masa lalu telah menunjukkan bukti mampu menegakkan nilai-nilai keluhuran, keutamaan, dan jati diri Yogyakarta. Namun pada saat ini, ketiga karakteristik Jogja ini tidak lagi menjadi penuntun gerak bermasyarakat-bangsa, tindak pemimpin, kerja birokrasi, dan dinamika kehidupan elemen warga untuk menuju kemartabatan yang istimewa. Sudah semestinya keistimewaan Yogyakarta adalah untuk Indonesia. Bahwa menjadi Jogja, adalah menjadi Indonesia.

Renaissance, *Jogja Gumregah*, Jogja Istimewa dapat menjadi wahana penggerak masyarakat menuju ke peningkatan dimensi nilai, pencarian nilai-nilai kebenaran, dimensi ekonomi terkait nilai kegunaan, dimensi estetis pada keindahan, dimensi sosial pada nilai "*trust*", dimensi politik pada nilai kuasa, dimensi keagamaan, dan nilai ketuhanan yang berkebudayaan.

Sangat disadari bahwa dalam lima tahun kebelakang, telah banyak hal dicapai melalui strategi "*Renaissance* Yogyakarta", namun juga harus diakui pula bahwa beberapa hal juga belum sempat dicapai melalui strategi tersebut. Untuk itulah, dalam lima tahun kedepan, spirit dari konsep "*Renaissance* Yogyakarta" secara konsisten tetap akan dipelihara, namun substansi dan penekananannya akan disesuaikan dengan perkembangan jaman dan prediksi atas kondisi-kondisi yang sekiranya akan terjadi dalam kurun lima tahun kedepan. Atas dasar latar belakang pemikiran tersebut, maka Visi Gubernur dalam lima tahun mendatang (2017-2022) adalah:

**Menyongsong "Abad Samudera Hindia" untuk
Kemuliaan Martabat Manusia Jogja**

Kemuliaan martabat manusia Jogja menyandang Misi "Lima Kemuliaan" atau "Pancamulia", yakni: (1) terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing, (2) terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, (3) terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan, (4) terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan

(5) terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

I. LATAR BELAKANG PENENTUAN TEMA "ABAD SAMUDERA HINDIA"

Sidang Paripurna DPRD DIY Yang Saya Mulyakan,

Mengenai pemilihan tema "Abad Samudera Hindia" yang diletakkan sebagai Visi Gubernur 2017-2022, dilandasi oleh latar belakang pemikiran sebagai berikut:

1) Fenomena IORA (*Indian Ocean Rim Association*)

IORA atau *Indian Ocean Rim Association* (Asosiasi Negara-negara Pesisir Samudera Hindia) adalah suatu asosiasi yang digagas oleh Nelson Mandela saat kunjungannya ke India pada bulan Maret 1995, yang dua tahun kemudian yakni pada Maret 1997 resmi berdiri menjadi organisasi dunia yang penting dan dihormati dengan nama *Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation* dan kemudian berubah nama dipersingkat menjadi *Indian Ocean Rim Association (IORA, 2017)*. Asosiasi ini memiliki anggota dari negara-negara yang memiliki pantai yang disentuh dan disatukan oleh air laut Samudra Hindia, yang mencakup negara-negara ASEAN, Australia, Asia Selatan, Asia Barat, Afrika Timur, dan Afrika Selatan. Asosiasi ini telah membuat kesepakatan-

kesepakatan kerjasama dibidang perikanan, energi kelautan, pelabuhan dan pelayaran, mineral dasar laut, bioteknologi kelautan, pariwisata, perdagangan, investasi, dan ekonomi.

Dalam pidatonya yang disampaikan di Wilson Center, Washington DC pada 22 September 2015, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menekankan peran penting Samudera Hindia sebagai episentrum kekuatan dunia di abad 21:

"Dari sudut pandang strategis, abad 19 ditentukan oleh Samudera Atlantik, abad 20 oleh Samudera Pasifik, dan abad 21 akan ditentukan oleh Samudera HindiaSamudera Hindia menjadi tempat tinggal bagi 2,6 miliar orang atau dua perlima jumlah penduduk dunia strategi maritim Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Presiden Jokowi harus mampu menjadi episentrum bagi Samudera Pasifik dan Samudera Hindia saat ini, separuh dari kapal kontainer dunia, sepertiga lalulintas kargo, dan dua pertiga pengiriman minyak dunia melalui jalur Samudera Hindia" (Marsudi, 2015).

Dalam konteks lalulintas kegiatan yang melintas wilayah Samudera Hindia tersebut itulah, maka peran kawasan-kawasan di bagian selatan pulau Jawa yang memiliki potensi kekayaan sumberdaya alam yang melimpah, menjadi sangat penting. Yogyakarta, yang memiliki wilayah garis pantai sepanjang 126 kilometer, yang mencakup tiga wilayah kabupaten, tentu juga akan memiliki posisi strategis dalam lalulintas perekonomian di wilayah Samudera Hindia.

2) Fenomena *Kra-Canal* atau *Thai-Canal Project*

Kra-Canal Project (Terusan Kra di Thailand), adalah suatu proyek terusan raksasa yang mirip dengan Terusan Suez dan Terusan Panama, yang akan *menyudut* leher semenanjung Thailand-Malaysia untuk menghubungkan perairan Laut Andaman dan perairan Teluk Thailand sehingga akan memperpendek jarak pelayaran dari belahan bumi bagian barat ke negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan China (Abdul Rahman, *et al*, 2016). Presiden Xi pada saat berpidato di depan Parlemen Indonesia pada tahun 2013 mengangkat fenomena ini menjadi konsep “*21st Century Maritime Silk Road*” atau “Jalur Sutera Maritim Abad 21” dan pada bulan Januari 2017, raja baru Thailand Vajiralongkorn mengindikasikan proyek ini segera akan dibangun (Billington 2017, Larouche 2017).

Dampak dari *Kra-Canal* terhadap peta intensitas lalu lintas pelayaran di perairan Asia Timur dan Asia Tenggara tentu akan sangat berarti dan khusus untuk perairan Indonesia akan berdampak pada meningkatnya intensitas pelayaran di ALKI-II (Alur Laut Kepulauan Indonesia-II yang mencakup Laut Sulawesi, Selat Makasar, Laut Flores, dan Selat Lombok). Meningkatnya intensitas pelayaran di ALKI-II tentu akan membawa dampak pada meningkatnya intensitas lalu lintas pelayaran silang antara Asia-Australia dan Samudera Hindia-Samudera Pasifik. Pada posisi seperti itulah peran kawasan-kawasan di wilayah Pulau Jawa Bagian Selatan menjadi sangat penting terutama dalam hal penyediaan jasa pelabuhan, energi, perikanan, dan pariwisata.

3) Fenomena Kemiskinan di Kawasan Jogja Selatan

Jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Maret 2017 adalah sekitar 488 ribu jiwa atau sekitar 13.02 per sen, masih cukup tinggi apabila dibanding dengan persentase penduduk miskin nasional sebesar 10.96 per sen (BPS DIY, 2017). Kalau dilihat dari distribusinya, maka jumlah warga miskin di wilayah perdesaan (16.11 %) lebih besar daripada jumlah warga miskin di wilayah perkotaan (11.72 %). Kondisi yang memprihatinkan menunjukkan bahwa warga miskin di wilayah perdesaan masih terjerat sebagian besar pada persoalan penyediaan pangan berupa pengeluaran untuk pembelian beras (sebesar 33.08 %), sedangkan di wilayah perkotaan hanya menunjukkan angka sebesar 27.31 per sen.

Kesenjangan antara warga kaya dan warga miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta juga cukup tinggi yang ditunjukkan dengan angka Rasio Gini sebesar 0.432, tertinggi di Indonesia dan disusul Gorontalo sebesar 0.41. Kesenjangan di perkotaan lebih tinggi (0.435) dibanding kesenjangan yang terjadi di perdesaan (0.340). Sementara indeks kedalaman kemiskinan di perdesaan (2.29) juga menunjukkan angka yang lebih tinggi daripada indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan (2.15), yang berarti warga miskin perdesaan harus berjuang lebih keras untuk bertahan hidup dengan membayar pengeluaran konsumsi yang lebih besar daripada warga miskin perkotaan.

Kesenjangan tersebut nampak jelas apabila dilihat secara kewilayahan dimana angka kemiskinan di Wilayah Bagian Selatan Yogyakarta yang mencakup wilayah Gunungkidul (20.83 %), Bantul (15.89 %) dan Kulonprogo (20.64 %) lebih tinggi dibanding dengan Wilayah Bagian Utara yakni Sleman (9.50 %) dan Yogyakarta (8.67 %) (BPS DIY, 2015). Fenomena ini memberikan latar belakang penting bagi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk lima tahun kedepan harus memberikan fokus dan perhatian terhadap pembangunan Wilayah Bagian Selatan Yogyakarta, selain untuk menyongsong "Abad Samudera Hindia" juga untuk meningkatkan "Harkat dan Martabat Warga Miskin di Wilayah Bagian Selatan Yogyakarta khususnya, dan di seluruh Wilayah Yogyakarta pada umumnya".

4) Fenomena Kesejarahan

Samudera Hindia pada abad ke-1 ternyata telah menjadi perairan yang cukup ramai oleh lalulintas kapal besar berukuran bobot mati 200 ton yang mampu mengangkut ratusan penumpang dan barang, menyusul surutnya lalulintas "Jalur Sutera Lintas Utara" yang menghubungkan China ke Timur Tengah, karena faktor meningkatnya ancaman keamanan berkaitan dengan terjadinya banyak perang dan kerusuhan lokal di sepanjang jalur tersebut (Munoz, 2006).

Kapal-kapal dari Persia dan Arab, berlayar menyusur Teluk Persia menuju India dan Asia Tenggara dengan menggunakan pengetahuan "angin musim" (*monsoons*). Menurut penuturan Munoz, kapal-kapal pedagang meninggalkan Teluk Persia pada bulan April agar dapat mencapai pantai barat India sebelum bulan

Mei. Pada bulan-bulan Juni, Juli dan Agustus adalah waktu yang sangat berbahaya bagi pelayaran karena adanya gelombang tinggi akibat arus kencang barat daya, sehingga pada bulan-bulan tersebut pelabuhan-pelabuhan di India barat ditutup. Apabila kapten kapal beruntung karena perjalanan yang dibawa angin lebih cepat dari waktu yang seharusnya, maka dia akan meneruskan pelayaran ke Pantai Timur India, Teluk Bengali, dan tiba di Pantai Barat Pulau Sumatera atau di Semenanjung Malaysia pada bulan September. Kapal-kapal akan kembali lagi ke perairan Arab dan Teluk Persia pada angin musim Timur Laut, yakni pada bulan November dan Desember.

Pada jeda waktu menunggu angin musim datang untuk dapat mendorong kapal-kapal untuk dapat berlayar lagi, maka kapten kapal dan para pedagang beristirahat, bergaul dan saling bertukar budaya dengan penduduk setempat, sehingga apa yang kita sebut saat ini sebagai "multikulturalisme", "kosmopolitanisme", dan "globalisme" sebetulnya telah ada dan terjadi pada abad ke-1 melalui kekuatan maritim Samudera Hindia. Hal ini menunjukkan bukti bahwa Samudera Hindia yang memiliki bentang ruang air sangat luas, ternyata bukan menjadi pemisah kantong-kantong peradaban yang tersebar di ujung-ujung perairannya, melainkan justru menyatukannya ke dalam satu jaringan peradaban yang sangat kuat dan jejaknya telah menjadi bagian kehidupan dan penghidupan kita saat ini.

Sidang Paripurna DPRD DIY Yang Saya Hormati,

Melompat ke abad ke 16, sebuah peta kuno yang diberi judul *Maris Pacifici* merupakan peta pertama kawasan perairan Samudera Pasifik yang dibuat pada tahun 1589 oleh Abraham Ortelius, menunjukkan fenomena yang sangat menarik. Didalam peta tersebut digambarkan dua buah perahu layar yang sedang berlayar melintas Samudera Pasifik. Pada bagian atas yang menghubungkan Wilayah Asia dengan Wilayah Amerika Utara digambarkan dengan perahu kecil, sedangkan di bagian bawah yang menghubungkan Wilayah Amerika Selatan dengan Wilayah Pasifik dan Asia Bagian Selatan digambarkan dengan perahu besar. Fenomena ini sungguh menarik, bahwa dimungkinkan sebelum Benua Australia didarati oleh kapal Inggris pada Januari 1788, telah terbentuk alur pelayaran yang cukup besar di wilayah Pasifik, yang secara spekulatif barangkali menghubungkan Wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara dengan Wilayah Amerika Selatan.

Seandainya asumsi spekulatif ini benar, maka pertanyaan spekulatif berikutnya (yang tentu saja memerlukan kajian mendalam dari bidang sejarah dan arkeologi) adalah mengapa bentuk dan beberapa detail Kuil Maya yang dibangun di wilayah Amerika Selatan mirip sekali dengan bentuk dan beberapa detail Candi Sukuh dan Candi Cetho di Jawa Tengah? Apakah keduanya terjadi muncul terbangun secara kebetulan saja mengikuti faham teori "*Multi Regionalism*", ataukah memang pernah ada "*Flow of Ideas*" yang telah dibawa oleh pelayaran kuno yang telah melintas dari Asia ke Amerika Selatan atau sebaliknya? Sekali lagi, tentu hipotesis atau asumsi ini memerlukan kajian yang mendalam,

namun yang ingin ditekankan disini adalah bahwa spirit pelayaran dari Samudera Hindia menuju ke Samudera Pasifik dan sebaliknya, tentu pernah ada atau pernah terjadi, sehingga alasan untuk menghadapkan dan menghadirkan kembali pentingnya Wilayah Perairan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dan khususnya Wilayah Pulau Jawa Bagian Selatan, adalah bukan suatu upaya yang tidak berdasar pada sejarah.

Dalam konteks pulau Jawa, kisah perjalanan laut dari Jawa ke arah wilayah Indonesia Timur telah terjadi pada awal abad ke-15:

"..... setelah memasuki abad ke-15, terutama ketika pelabuhan Malaka menggantikan kedudukan Tuban sebagai pusat perdagangan Asia Tenggara sekitar tahun 1400, pedagang Jawa melakukan ekspansi langsung ke wilayah Indonesia Timur untuk mengimbangi upaya pedagang Cina yang hendak langsung mencari sendiri komoditas rempah-rempah ke wilayah ini. Pada saat itu pula, produksi beras dan barang-barang lain yang berasal dari Jawa diperdagangkan langsung oleh pedagang-pedagang Jawa di wilayah Indonesia Timur" (*cf.* Hauben 1996; Reid 1992 dalam Rahardjo, Supratikno 2011:293-294).

Pernyataan tersebut menguatkan bahwa nenek moyang orang Jawa telah cukup lama mengakrabi dua alam kehidupan perekonomian, yakni pertanian dan perdagangan melalui laut atau yang kita kenal sebagai *among tani dagang layar*. Dengan demikian, pilihan tema kemaritiman sebagai payung Kebijakan Pembangunan Lima Tahun ke depan, merupakan upaya menyambung sejarah yang telah lama diukir oleh nenek moyang, namun kemudian telah dilupakan sejak sekitar 1670-an melalui penghancuran sendiri armada-armada independen pedagang Jawa oleh Amangkurat I (Ricklefs, 2002).

II. ESENSI "ABAD SAMUDERA HINDIA" DALAM BINGKAI TRILOGI FILOSOFI KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Sidang Paripurna DPRD DIY Yang Saya Mulyakan,

Ke-empat fenomena yang telah dipaparkan di atas, dalam kesempatan yang sangat mulia ini saya usulkan sebagai landasan empiris sekaligus landasan historis untuk membangun tema "**Abad Samudera Hindia**" sebagai payung berpikir dan bertindak untuk merumuskan dan melaksanakan program-program Pembangunan Lima Tahun ke depan. Tema baru ini sangat gayut dengan Trilogi Filosofi Keistimewaan Yogyakarta, yakni: **Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, dan Manunggaling Kawula Gusti.**

Sangat disadari memang, bahwa pada lima tahun kemarin, ketika Trilogi Filosofi tersebut dipadukan dengan tema "*Renaissans Yogyakarta*", telah banyak capaian-capaian yang diraih secara konsisten dan memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam membawa perubahan-perubahan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun juga harus diakui secara jujur, bahwa masih terdapat beberapa "gap" atau kesenjangan antara pesan-pesan filosofis dan konsep-konsep *Renaissans* dengan program-program yang disusun serta pelaksanaannya di lapangan. Untuk itulah, tema baru ini (Abad Samudera Hindia) diletakkan untuk selain mengisi kembali celah-celah kesenjangan yang masih tertinggal tersebut, juga sebagai landasan pijak untuk membawa Daerah Istimewa Yogyakarta meraih capaian-capaian besar yang mampu

meningkatkan harkat dan martabat manusia-manusia Yogyakarta, pada lima tahun ke depan.

Tema "Abad Samudera Hindia", secara tegas menegaskan kembali sumbu imajiner Gunung Merapi - Laut Kidul, yang memiliki makna dan ajaran harmoni kosmos, dalam pengertian bahwa bentang ruang wilayah Yogyakarta mulai dari Puncak Gunung Merapi di Sleman sampai ke Bibir Pantai dan Lidah Air Laut Kidul, merupakan suatu kesatuan bentang ruang ekologis, yang harus diperlakukan secara utuh, ibaratnya sebagai satu sosok tubuh manusia yang memiliki kepala, badan, dan kaki. Dalam konsepsi kosmos seperti itu, maka perlakuan pembangunan di wilayah Sleman dan Kota Yogyakarta harus memiliki "tenggang ekologis" dengan wilayah Bantul, Gunungkidul dan Kulonprogo. Demikian pula sebaliknya, perlakuan pembangunan di wilayah Bantul, Gunungkidul dan Kulonprogo harus memiliki "rujuk ekologis" dengan wilayah Sleman dan Kota Yogyakarta. Untuk itulah, filosofi **Hamemayu Hayuning Bawana**, yang analog dengan konsep *Sustainable Development*, sangat relevan dan sangat diperlukan untuk **Hamemayu Hayuning Ngayogyakarta Hadiningrat**.

Dalam konsepsi "tata air" dan "tata budaya sawah", maka Gunung Merapi merupakan "**sangkan**" bagi "**dumadi**" nya tata kehidupan hijau di bentang wilayah sampai ke wilayah daratan pesisir Laut Kidul. Dalam pesan filosofis "**Sangkan Paraning Dumadi**", jalinan antara Gunung Merapi dengan Laut Kidul mengajarkan tentang sejarah bentang ruang fisik Ngayogyakarta Hadiningrat, dimana Merapi dengan kapasitasnya yang melimpah telah meyuburkan dan menghidupkan bentang ruang khususnya di

wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Bantul. Namun demikian, Gunung Merapi juga punya kuasa untuk mengubur peradaban manusia Yogyakarta (yang pada waktu itu bernama Mataram Kuno dengan pusatnya di Medang) yang ditegakkan pada tahun 732 M oleh Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, yang kemudian setelah sekitar dua ratus tahun berjaya, dikubur oleh lahar Merapi (Munoz, 2006), sehingga cucu keturunannya yang bernama Sindok terpaksa memindahkannya ke Jawa Timur pada tahun 929M (Rahardjo, 2011). Bentang ruang Mataram Kuno setelah terkubur oleh lahar Merapi, kemudian digantikan dengan bentang ruang baru tempat kita saat kemarin, saat ini dan saat nanti membangun peradaban baru Yogyakarta.

Dari sisi lain diluar perspektip spiritual, filosofi **Manunggaling Kawula lan Gusti** sebagai suatu konsepsi kepemimpinan ideal dan pelapisan sosial dalam kerangka membangun kesejahteraan rakyat, secara "implisit" pernah tertulis dalam Prasasti Canggal (732M) seperti dituturkan oleh Rahardjo (2011):

"Gagasan tentang kepemimpinan ideal yang menggabungkan kemampuan membagi kekayaan, meningkatkan kesejahteraan dan prestasi di bidang kemiliteran, mula-mula disebutkan dalam prasasti Canggal (732M). Prasasti ini memuat pujian tentang kepemimpinan ideal yang ditujukan kepada Sanna, yakni pendahulu raja Mataram pertama, Sanjaya bahwa kedudukan yang dicapai Sanna didahului oleh prestasi-prestasi yang terpuji. Sebagai penguasa, ia melaksanakan tanggung jawabnya untuk menciptakan kesejahteraan dan perlindungan bagi rakyatnya" (cf. Sarkar,1971:21; Wicks, 1992:246, dalam Rahardjo, 2011:69-70).

"Gagasan-gagasan Sanna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya tercermin dalam sumber-sumber prasasti yang berkaitan dengan pemberian anugerah *sima* oleh raja dengan diikuti oleh pembukaan tanah lama kurang produktif (ladang, pekarangan, kebun) menjadi lahan baru yang lebih produktif, yakni sawah. Pranata *sima* untuk meningkatkan kesejahteraan tampak sangat dominan pada masa itu" (Rahardjo, 2011:70).

Dalam konteks Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, praktikum dari Pranata *Sima* seperti yang telah dilakukan oleh Raja Sanna tersebut, telah dilakukan oleh Kasultanan sejak HB I (1755-1950) melalui kebijakan pertanahan yang berupa: hak hanganggo turun temurun, hak handarbe, hak anggaduh (pengarem-arem, lungguh bengkok, kepentingan umum, kas desa) ngindung, dan magersari (Suyitno, *tt*). Dalam konteks "Abad Samudera Hindia", khususnya kaitan dengan pembangunan Wilayah Yogyakarta Bagian Selatan, maka konsep *Pranata Sima* ini terasa masih sangat relevan dengan situasi saat ini, walaupun usianya sudah hampir 1300 tahun. Konsep tersebut mirip dengan konsep *Land Sharing* yang digunakan dalam konteks pembangunan perkotaan moderen, yang digunakan untuk membangun kesejahteraan rakyat sekaligus menumbuhkan ekonomi negara.

Untuk melindungi warga masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat Yogyakarta Bagian Selatan khususnya, konsep *Land Sharing* dapat dipertimbangkan untuk digunakan dalam pembangunan wilayah Yogyakarta Bagian Selatan, dalam rangka menyongsong "Abad Samudera Hindia".

II. TEMA "ABAD SAMUDERA HINDIA" SEBAGAI PAYUNG BERPIKIR ARAH PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM LIMA TAHUN MENDATANG

Sidang Paripurna DPRD DIY Yang Saya Mulyakan,

Esensi dari tema "Abad Samudera Hindia" yang ingin ditekankan disini adalah esensi tentang "Perjumpaan" dalam pengertiannya yang sangat luas. Sebagai paradigma baru, "Abad Samudera Hindia" telah melahirkan perjumpaan akbar antar tokoh-tokoh perwakilan negara yang memiliki bibir pantai bersinggungan dengan air laut Samudera Hindia, yang kemudian berujung pada terbentuknya konsensus yang melahirkan asosiasi negara-negara berpesisir Samudera Hindia (*IORA-Indian Ocean Rim Association*). Perjumpaan akbar tersebut kemudian diikuti dengan perjumpaan-perjumpaan rinci seperti perjumpaan budaya, perjumpaan ekonomi, perjumpaan investasi, perjumpaan pariwisata, perjumpaan pendidikan, serta perjumpaan-perjumpaan lainnya.

"Perjumpaan" dari beragam manusia yang berasal dari beragam tempat dan berbagai latar ragam budaya dalam kerangka besar Samudera Hindia, sebenarnya telah terjadi sejak abad ke-1 seperti yang telah digambarkan oleh Munoz (2006) di depan. Hal ini disangatkan oleh Lombard (2008) dalam penuturannya tentang Nusa Jawa Silang Budaya sebagai berikut:

"..... dalam hal jaringan-jaringan perniagaan Asia, dasarnya sama, menyangkut suatu masyarakat yang terbuka pada angin laut lepas dan tercangkok pada sejumlah kota pelabuhan yang hampir sama satu sama lain jelas bahwa kawasan Nusantara seperti halnya Italia di Eropa, pernah lama mengenal 'pola' kota niaga yang terbuka pada perdagangan internasional besar dan relatif bebas dari kebakuan pola budaya agraris dari ujung satu ke ujung lain Samudera Hindia, pengamat luar tidak bisa tidak terkesan oleh keberadaan komunitas-komunitas orang *Khoja* India, orang Armenia, orang Arab, orang Cina Hokchia, kelompok Banyan, Chettiar, Parsi, Gujarat, Ismailia didalam gugusan budaya ini, dunia perkotaan tidak terputus dari dunia perdesaan, yang ada adalah kesinambungan yang mulai dari istana dan meluas sampai ke pinggir-pinggir kawasan hutan" (Lombard, 2008:170-174).

"Perjumpaan" dalam pengertian Lombard diatas adalah suatu peristiwa "Silang Budaya", dimana dua budaya atau lebih saling bertemu dan saling menyapa serta saling bertukar diri untuk selanjutnya "memampat membentuk energi baru", sehingga muncullah budaya baru yang mengantar masyarakat menuju pada perubahan atau kemajuan.

Yogyakarta, pada hakekatnya secara geografis, ekonomi, sosiologis, kultural, dan historis ada pada posisi pusat persilangan budaya, seperti apa yang digambarkan oleh Lombard tersebut. Sifat-sifat masyarakat yang disentuh oleh peristiwa silang budaya biasanya memiliki sifat-sifat yang disebut oleh Dahana (2015) sebagai "Masyarakat Bahari" atau "Masyarakat yang memiliki "*Basic Value* Kota Bandar", yakni masyarakat yang menjunjung tinggi: kesetaraan, kebebasan, toleransi, akseptansi, keterbukaan, penerimaan, persaudaraan, interkultural, multikultural, untuk

kemudian menjelma menjadi sifat-sifat keseharian seperti dermawan, gotong royong, pekerja keras, jujur, tekun, dan kreatif.

Secara eksplisit, esensi dari "Abad Samudera Hindia" yang nantinya akan diletakkan sebagai tema dan payung berpikir dalam perumusan **Arah Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta** dalam **Lima Tahun ke depan**, dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Yogyakarta akan bertindak secara aktif mengisi kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia dalam Kerangka Perjanjian *IORA (Indian Ocean Rim Association)*, untuk mengembangkan Wilayah Yogyakarta Bagian Selatan semata-mata untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja secara keseluruhan, baik yang tinggal di Wilayah Selatan maupun yang tinggal di Wilayah lain di seluruh Yogyakarta. Peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja mencakup pengertian peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan sosial dan beradab.
- 2) Semangat "Perjumpaan" dan "Silang Ekonomi" akan diletakkan sebagai strategi kebudayaan untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan yang masih menggelayut di Wilayah Yogyakarta secara keseluruhan, dalam kerangka meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja, melalui langkah-langkah perjumpaan dan saling silang: antara pelaku ekonomi kuat dengan pelaku ekonomi lemah, antara pelaku ekonomi perkotaan dengan pelaku ekonomi perdesaan, antara pelaku ekonomi moderen dengan pelaku ekonomi tradisional, antara pelaku ekonomi bermodal besar dengan pelaku ekonomi bermodal kecil, dan antara pelaku

ekonomi internasional dengan pelaku ekonomi lokal. Pendek kata, melalui "Strategi Perjumpaan dan Saling Silang", maka dalam Lima Tahun ke depan, pembangunan ekonomi di Wilayah Yogyakarta diarahkan untuk tidak saja meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang kurang beruntung.

- 3) Semangat "Perjumpaan" dan "Silang Keruangan Wilayah" akan diletakkan sebagai strategi untuk memajukan wilayah-wilayah pinggiran melalui silang infrastruktur wilayah, sehingga interkoneksi antara permukiman-permukiman terpencil dengan pusat-pusat pelayanan masyarakat akan terbangun secara baik, termasuk "silang kerjasama infrastruktur" dengan wilayah-wilayah kabupaten tetangga terutama untuk wilayah-wilayah tersulit karena faktor topografi.
- 4) Semangat "Perjumpaan" dan "Silang Birokrasi" akan diletakkan sebagai strategi untuk menciptakan program-program besar yang memiliki kapasitas dan dampak besar bagi perubahan-perubahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga ke depan, harus dikurangi terciptanya banyak program-program kecil berbiaya besar, untuk kemudian digantikan dengan program-program besar berdampak besar melalui program-program berbasis "Silang SKPD". Dengan perkataan lain, ke depan program-program "Silang SKPD" yang berbasis "Tema-tema Besar" akan didorong prioritasnya dibanding dengan program-program kecil berbasis SKPD tunggal.

- 5) Semangat "Perjumpaan" dan "Silang Birokrasi" akan diletakkan sebagai strategi untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang demokratis, baik melalui "strategi silang vertikal" (keterbukaan di internal SKPD), "strategi silang horisontal" (keterbukaan antar SKPD), dan "strategi silang heterarki" (gabungan keterbukaan vertikal dan horisontal antar SKPD).
- 6) Semangat "Perjumpaan" dan "Silang Kelembagaan" akan diletakkan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara, melalui "silang belajar" ke lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemerintahan DIY, termasuk lembaga pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perekonomian swasta, serta belajar dari pengalaman-pengalaman daerah dan negara lain, dalam rangka menciptakan "**Trilogi SDM-DIY**" atau "**E2-K**" yakni: ETOS, ETIKA, dan KUALITAS. **Etos**, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan perubahan persepsi (*mind set*) dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantor, menjadi tugas birokrasi sebagai "**karya peradaban**", yang menyandang arti bahwa semua karya pelayanan birokrasi adalah "karya peradaban", karena tanpa kontribusi karya pelayanan birokrasi peradaban di DIY tentu tidak akan berkembang menjadi peradaban seperti yang dapat kita saksikan hari ini. **Etika**, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan "kemuliaan" dalam pengertian bersatunya "pikiran mulia, niat mulia, dan tindakan mulia", dalam rangka menciptakan SDM yang "berintegritas" yang menjunjung tinggi budaya malu dan budaya merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan.

Kualitas, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyanggah pesan adanya pergeseran *mind set*, bahwa karya birokrasi bukanlah dipersepsi hanya sebagai "karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran", melainkan menuju pada pembentukan "sikap" bahwa karya birokrasi DIY adalah "karya yang dapat menjadi rujukan" bagi birokrasi-birokrasi dan lembaga-lembaga lain di tempat lain (nasional maupun internasional). Ketika karya tersebut menjadi "rujukan", maka karya tersebut merupakan karya yang berkualitas, yang merupakan hasil dari karya yang "diniati" untuk menjadi "karya berkualitas tinggi". Untuk itu, membangun birokrasi dengan "Ruh budaya karya berkualitas tinggi" akan menjadi penting bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Lima Tahun ke depan. Ketiga aspek "**Trilogi SDM-DIY**", merupakan satu kesatuan yang utuh. Negara Scandinavia dan Jepang, adalah contoh negara yang memiliki SDM dengan etos kerja tinggi, etika tinggi, dan budaya kualitas tinggi. Negara Jerman pada masa Hitler adalah contoh negara yang memiliki SDM dengan etos kerja tinggi, etika rendah, dan budaya kualitas tinggi. Salah satu negara di dunia yang sedang tumbuh dengan cepat (namun sayang sekali) memiliki SDM dengan etos kerja tinggi, etika rendah, dan budaya kualitas rendah.

- 7) Semangat "Perjumpaan" dan "Silang Budaya" akan diletakkan sebagai strategi untuk meningkatkan harmoni kehidupan bersama masyarakat Yogyakarta, melalui program-program saling silang perjumpaan antara: (i) budaya Jawa dengan budaya-budaya etnik lain yang ada di Yogyakarta, (ii) antara budaya Jawa dengan budaya antar bangsa termasuk dengan

budaya-budaya bangsa yang tergabung dalam *IORA* (Yogyakarta berpotensi sebagai "*Hub*" atau pusat budaya *IORA*), (iii) silaturahmi budaya antar kelompok agama yang ada di Yogyakarta dan Indonesia, (iv) program silang belajar antar sekolah pada kelas-kelas awal sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas untuk "saling kenal sekolah" sehingga mata rantai tradisi dan sejarah pertikaian atau tawuran antar sekolah tertentu dapat diputus.

Sidang Paripurna DPRD DIY yang saya hormati,

Demikianlah pemikiran-pemikiran Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Lima Tahun ke depan, sebagai acuan bagi disusunnya program-program pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, kepada Kita semua, aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Agustus 2017
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta



HAMENGGU BUWONO X

RUJUKAN

- Abdul Rahman, Noorul Shaiful Fitri; Mohd Salleh, Nurul Haqimin; Ahmad Najib, Ahmad Fayas; and Lun2 Venus Y. H. (2016). "A descriptive method for analysing the Kra-Canal decision on maritime business patterns in Malaysia", *Journal of Shipping and Trade*, in <https://jshippingandtrade.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s4107201600160?site=jshippingandtrade.springeropen.com>, diakses 19 Juli 2017.
- Billington, Michael (2017). "Kra-Canal Close to Reality: A Hub for the Maritime Silk Road", in http://www.larouchepub.com/eiw/public/2017/eirv44n04-20170127/05-09_4404.pdf, diakses 9 Juli 2017.
- Dahana, Radar Panca. "Garda Depan Bahari" *Kompas*, 18 Juni 2015.
- IORA (2007). *Indian Ocean Association*, <http://www.iora.net/about-us/background.aspx>, diakses tgl 18 Juli 2017.
- Larouche (2017). "Major Breakthrough on Kra-Canal Potential", in <https://larouchepac.com/20170117/major-breakthrough-kra-canal-potential>, diakses 19 Juli 2017.
- Lombard, Dennys (2008). *Nusa Jawa: Silang Budaya*, Bagian III Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris, alih bahasa Arifin, Winarsih Partaningrat; Hidayat, Rahayu S; Yusuf, Nini Hidayati, Gramedia Pustaka Utama-Forum Jakarta Paris, Jakarta.
- Marsudi, Retno (2015). "Abad 20 Milik Samudera Pasifik, Abad 21 Milik Samudera Hindia", dalam <https://news.detik.com/berita/3026408/menlu-retno-abad-21-milik-samudera-hindia>, diakses tgl 18 Juli 2017.
- Munoz, Paul Michel (2006). *Early Kingdoms of the Indonesian Archipelago and the Malay Peninsula*, Mainland Press, Singapore.
- Ortelius, Abraham (1589). "Public Domain", gambar peta, dalam <en.m.wikipedia.org> diakses 15 Februari 2017.

- Rahardjo, Supratikno (2011). *Peradaban Jawa dari Mataram Kuno sampai Majapahit Akhir*, Pengantar Edi Sedyawati, Komunitas Bambu, Jakarta.
- Reid, A. (1992)/1988. *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680*, Jilid I (Tanah di Bawah Angin), terjemahan dengan Kata Pengantar oleh Onghokham), Jakarta, Yayasan Obor, *dalam* Rahardjo, Supratikno (2011:293-294). *Peradaban Jawa dari Mataram Kuno sampai Majapahit Akhir*, Komunitas Bambu, Jakarta.
- Reid, A. (1992). The Rise and Fall of Sino-Javanese Shipping. Lihat Houben dkk (peny.), h.177-211., *dalam* Rahardjo, Supratikno (2011:293-294). *Peradaban Jawa dari Mataram Kuno sampai Majapahit Akhir*, Komunitas Bambu, Jakarta.
- Ricklefs, M.C. (2002). *Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi 1749-1792: Sejarah Pembagian Jawa*, terjemahan dari *Jogjakarta under Sultan Mangkubumi 1749-1792: A History of the Division of Java*, oleh Hartono Hadikusumo dan E.Setiyawati Alkhatab, Matabangsa, Yogyakarta.
- Sarkar, H.B. (1971-1972). *Corpus of the Inscriptions of Java (Corpus Inscriptionum Javanica-rum) (up to 928)*, Vol.I dan II. Calcutta: Firma K.L. Mukhopadhyay, *dalam* Rahardjo, Supratikno (2011:69-70). *Peradaban Jawa dari Mataram Kuno sampai Majapahit Akhir*, Pengantar Edi Sedyawati, Komunitas Bambu, Jakarta.
- Suyitno (tt). "Kedudukan Tanah Kasultanan (SG)-Tanah Kadipaten (PAG) di DIY", Diagram, *tanpa tahun*, tidak dipublikasikan.
- Wicks, Robert S (1992). *Money, Market, and Trade in Early Southeast Asia, The Development of Indegenous Monetary System to A.D 1400*, New York: Cornell University Southeast Asia Program, *dalam* Rahardjo, Supratikno (2011:69-70). *Peradaban Jawa dari Mataram Kuno sampai Majapahit Akhir*, Pengantar Edi Sedyawati, Komunitas Bambu, Jakarta.